



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG : EKSEKUTIF**

**LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA**

**UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN  
PENGENDALIAN PENDUDUK**

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ADELINA IMANNA MARIA GORRETTI**
2. Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN**
3. NHK : **1007477**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

**Rp. 2.117.000.000**

1. Tanah Seluas 514 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI  
Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/150 m2 di KAB / KOTA  
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
3. Tanah Seluas 543 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI  
Rp. 353.000.000
4. Tanah Seluas 980 m2 di KAB / KOTA NABIRE, WARISAN Rp.  
200.000.000
5. Tanah Seluas 344 m2 di KAB / KOTA NABIRE, WARISAN Rp.  
100.000.000
6. Tanah Seluas 404 m2 di KAB / KOTA NABIRE, WARISAN Rp.  
100.000.000
7. Tanah Seluas 341 m2 di KAB / KOTA NABIRE, WARISAN Rp.  
100.000.000
8. Tanah Seluas 1289 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL  
SENDIRI Rp. 64.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

**Rp. 88.000.000**

1. MOBIL, DAIHATSU F600RV-GMDFJJ Tahun 2011, HASIL  
SENDIRI Rp. 55.000.000
2. MOTOR, HONDA D1B02N12L2 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI



Rp. 7.000.000

3. MOBIL, ISUZU TBR52PRLC Tahun 1993, HASIL SENDIRI Rp.  
25.000.0004. MOTOR, HONDA ASTREA C 100 Tahun 1990, HASIL SENDIRI  
Rp. 1.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 6.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 15.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.226.500.000

III. HUTANG Rp. 85.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.141.500.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.